

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PASER**



SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP-741/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Paser;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025- 2045;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Denga Triwulan I	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	22
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.....	23
BAB IV PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra 2022 s/d 2024	10
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Paser	19
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	21
Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	29
Tabel 5 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	33
Tabel 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara keseluruhan terdiri dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir, dan Penetapan Ranwal Renja. Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, dimana Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke empat dalam periode Renstra Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode dalam 1 (satu) tahun, yang

bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan perangkat daerah, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Pasal 4 ayat (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Inspektorat Daerah Kabupaten Daerah, hasil pengendalian pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Ranhir Renja Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Inspektorat Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser antara lain :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser yang akan dilaksanakan pada triwulan II, triwulan III dan triwulan IV Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Paser Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, proses penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah kabupaten Paser, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah kabupaten Paser, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025.

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat :

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025**

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	89	Laporan	1.094.800.000	52	Laporan	2.233.984.456	19	Laporan	417.757.000	14	32.810.000	14	32.810.000	66	2.266.794.456	74	207,05		
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	160	Laporan	1.313.098.697	65	Laporan	789.394.608	67	Laporan	461.565.500	15	28.400.000	15	28.400.000	80	817.794.608	50	62,28		
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	8	Kesepakatan	664.820.000	6	Kesepakatan	749.369.851	1	Kesepakatan	139.008.000	0	0	0	0	6	749.369.851	75	112,72		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20	Laporan	2.195.028.000	12	Laporan	2.185.515.923	4	Dokumen	634.704.323	0	28.162.200	0	28.162.200	12	2.213.678.123	60	100,85		
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100	Persentase	1.730.450.867	100	Persentase	1.566.834.263	100	Persentase	916.849.000	20,00	54.832.003	20,00	54.832.003	80,00	1.621.666.266	80,00	93,71		
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	121	Laporan	1.730.450.867	63	Laporan	1.566.834.263	5	Laporan	916.849.000	1	54.832.003	1	54.832.003	64	1.621.666.266	53	93,71		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	90	Persentase	1.227.271.013	39,02	Persentase	1.434.940.954	85	Persentase	2.587.421.586	39,02	210.192.820	39,02	210.192.820	1.645.133.774	81,32	1.645.133.774	43,36	134,05	
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	90	Persentase		80	Persentase		80	80,00		80,00		88,89							
	Pendampingan dan Asistensi	Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100	Persentase	1.227.271.013	100	Persentase	1.434.940.954	100	Persentase	2.587.421.586	25,29	210.192.820	25,29	210.192.820	81,32	1.645.133.774	81,32	134,05		

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Per ang kat Da era h		Per ang kat Da era h		Per ang kat Da era h		Per ang kat Da era h		Per ang kat Da era h	Triwulan Ke 1							
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	Per ang kat Da era h	193.800.000	41	Per ang kat Da era h	45.367.255	41	Per ang kat Da era h	261.026.000	16	48.625.000	16	48.625.000	41	93.992.255	100	48,50	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42	Per ang kat Da era h	538.090.000	42	Per ang kat Da era h	369.830.298	42	Per ang kat Da era h	600.414.000	4	149.030.235	4	149.030.235	42	518.860.533	100	96,43	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8	Keg iata n	403.581.013	4	Keg iata n	955.690.381	3	Keg iata n	1.488.289.586	2	12.537.585	2	12.537.585	6	968.227.966	75	239,91	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	Per ang kat Da era h	91.800.000	1	Per ang kat Da era h	64.053.020	1	Per ang kat Da era h	237.692.000	0	0	0	0	1	64.053.020	100	69,77	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel		Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	BB (71)	Nil ai	78.681.416.008	B (67,89)	Nil ai	28.416.009.948	B B(70,5)	Nil ai	24.791.557.151	B (67,89)	4.320.682.374	B (67,89)	4.320.682.374	B (67,89)	32.736.692.322	95,62	41,61	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	84	Per sen	78.681.416.008	72	Per sen	28.416.009.948	80	Per sen	24.791.557.151	76	4.320.682.374	76	4.320.682.374	76,00	32.736.692.322	90,48	41,61	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Per sen	1.092.730.000	100	Per sen	395.378.960	100	Per sen	396.966.000	43,75	39.573.505	43,75	39.573.505	71,88	434.952.465	71,88	39,80	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29	Dok um en	251.230.000	15	Dok um en	62.148.700	7	Dok um en	130.740.000	4	20.373.505	4	20.373.505	19	82.522.205	66	32,85	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	99.000.000	4	Laporan	0	4	Laporan	140.706.000	1	0	1	0	5	0	42	0,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Laporan	742.500.000	25	Laporan	333.230.260	5	Laporan	125.520.000	2	19.200.000	2	19.200.000	27	352.430.260	77	47,47	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Per sen	67.754.164.572	100	Per sen	24.267.137.230	100	Per sen	16.946.877.679	70,50	3.506.242.287	70,50	3.506.242.287	85,25	27.773.379.517	85,25	40,99	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/Bulan	66.764.814.572	60	Orang/Bulan	23.858.138.840	60	Orang/Bulan	16.582.934.479	60	3.476.657.487	60	3.476.657.487	60	27.334.796.327	100	40,94	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1000	Dokumen	720.850.000	600	Dokumen	319.681.590	200	Dokumen	309.073.200	123	29.584.800	123	29.584.800	723	349.266.390	72	48,45	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19	Laporan	268.500.000	17	Laporan	89.316.800	1	Laporan	54.870.000	1	0	1	0	18	89.316.800	95	33,27	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Per sen	90.000.000	100	Per sen	0	100	Per sen	35.568.000	10,00	0	10,00	0	55,00	0	55,00	0,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	45.000.000	4	Laporan	0	4	Laporan	6.300.000	1	0	1	0	5	0	42	0,00	
	Penatausahaan BMD SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18	Laporan	45.000.000	6	Laporan	0	6	Laporan	29.268.000	0	0	0	0	6	0	33	0,00	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Per sen	4.344.070.000	100	Per sen	1.591.510.819	100	Per sen	4.197.820.500	84,13	491.018.797	84,13	491.018.797	92,06	2.082.529.616	92,06	47,94	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen	90.000.000	1	Dokumen	0	1	Dokumen	669.395.500	0	23.749.000	0	23.749.000	1	23.749.000	33	26,39	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34	Orang	635.710.000	26	Orang	271.171.358	3	Orang	282.066.000	0	0	0	0	26	271.171.358	76	42,66	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	3.618.360.000	55	Orang	1.320.339.461	59	Orang	3.246.359.000	53	467.269.797	53	467.269.797	108	1.787.609.258	179	49,40	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Per sen	3.120.262.336	100	Per sen	1.389.558.346	100	Per sen	2.323.603.537	21,19	187.866.917	21,19	187.866.917	60,60	1.577.425.263	60,60	50,55	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	4	Paket	396.000.000	15	Paket	364.332.400	14	Paket	1.266.227.232	0	0	0	0	15	364.332.400	375	92,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5	Paket	1.028.436.336	3	Paket	429.001.830	3	Paket	328.291.535	1	133.380.500	1	133.380.500	4	562.382.330	80	54,68	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	294.920.000	3	Paket	100.250.250	3	Paket	59.691.750	0	0	0	0	3	100.250.250	60	33,99	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	754	Dokumen	25.000.000	274	Dokumen	5.400.000	240	Dokumen	5.100.000	60	450.000	60	450.000	334	5.850.000	44	23,40	

Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang di Evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Lap ora n		Lap ora n	Lap ora n	Lap ora n	Lap ora n	Lap ora n	Triwulan Ke 1									
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	303	Lap ora n	130.000.000	103	Lap ora n	23.445.000	100	Lap ora n	81.408.020	20	0	20	0	123	23.445.000	41	18,03	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241	Lap ora n	1.239.910.000	127	Lap ora n	461.553.866	60	Lap ora n	582.885.000	8	54.036.417	8	54.036.417	135	515.590.283	56	41,58	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Per sen	207.678.000	100	Per sen	19.460.400	100	Per sen	377.090.843	0,00	0	0,00	0	50,00	19.460.400	50,00	9,37	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	109.678.000	2	Unit	0	29	Unit	175.133.843	0	0	0	0	2	0	50	0,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	98.000.000	2	Unit	19.460.400	3	Unit	201.957.000	0	0	0	0	2	19.460.400	50	19,86	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100	Per sen	1.203.380.000	100	Per sen	433.417.599	100	Per sen	321.272.000	25,00	76.310.000	25,00	76.310.000	62,50	509.727.599	62,50	42,36	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Lap ora n	1.203.380.000	36	Lap ora n	433.417.599	12	Lap ora n	321.272.000	3	76.310.000	3	76.310.000	39	509.727.599	65	42,36	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Per sen	869.131.100	100	Per sen	319.546.594	100	Per sen	192.358.592	6,45	19.670.868	6,45	19.670.868	53,23	339.217.462	53,23	39,03	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	814.231.500	7	Unit	263.023.294	6	Unit	174.508.592	2	19.670.868	2	19.670.868	9	282.694.162	144	34,72	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	45.000.000	0	Unit	0	25	Unit	17.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Berdasarkan Tabel 1 diatas Realisasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 15,66%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.953.339.140,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 31.624.951.060,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebesar 36,56% dengan predikat kinerja sangat rendah.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 5 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 3 indikator capaian kinerja 0%-50% = 26 indikator

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok yaitu:

"Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah".

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat daerah juga menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Tingkat Maturitas SPIP;
2. Tingkat Kapabilitas APIP; dan
3. Nilai Evaluasi SAKIP.

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra					Realisasi		
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71	71,25	71,5	71,75	72	71,51	74,00	N/A
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.309)	Level 3 (3.432)	N/A
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	Level 3 (3.000)	N/A
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	B (65)	B (68)	B (70)	BB (70,5)	BB (71)	B (67,89)	N/A	N/A

Berdasarkan Tabel 2 di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)”, pada Tahun 2024 telah melampaui target, dimana realisasinya

- sebesar 74,00 dari target sebesar 71,5 dengan capaian kinerja sebesar 103%, sedangkan pada Tahun 2025 belum dilaksanakan penilaian;
- b. Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan” memiliki 2 indikator kinerja yang pertama yaitu “Tingkat Maturitas SPIP”, pada Tahun 2023 telah melampaui target, dimana realisasinya sebesar Level 3 (3.432) dari target sebesar Level 3 (3.000) dengan capaian kinerja sebesar 114% dan indikator kinerja yang kedua yaitu “Tingkat Kapabilitas APIP” pada Tahun 2023 telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar Level 3 (3.000) dari target sebesar Level 3 (3.000) dengan capaian kinerja sebesar 100%, sedangkan pada Tahun 2025 belum dilaksanakan penilaian; dan
 - c. Sasaran 2 “Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat”, pada Tahun 2023 belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar B (67,89) dari target sebesar B (68) dengan capaian kinerja sebesar 99,83%, sedangkan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 belum dilaksanakan penilaian.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Periode sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 :

1. SDM dan APIP yang berkompeten dan telah bersertifikasi;
2. Koordinasi pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik; dan
3. Koordinasi internal di bidang maupun antar struktural berjalan lancar.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya :

1. Adanya kegiatan mandatori dari Pusat yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan menggeser kegiatan yang sudah dijadwalkan pada PKPT;

2. Kurangnya SDM Pengawasan serta SDM yang melaksanakan ketugasan administrasi (JFU), sehingga pekerjaan administrasi juga dihandle oleh beberapa JFT; dan
3. Belum memadainya saran prasarana penunjang pengawasan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengawasan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3

Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target Renja 2025
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Hasil Survei dari 3 sumber data, yaitu : Hasil Survei dari 3 sumber data, yaitu : 1. Sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD; 2. Sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD; dan 3. Sumber ekspert atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman.	71,75
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Level 3 (3.000)
	Tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Level 3 (3.000)
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Paser	BB (70,5)

Memperhatikan tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada

APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 yaitu “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA DI SELURUH KABUPATEN PASER” yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pemerataan Konektivitas untuk Mendukung Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah.
2. Pemenuhan Pelayanan Dasar yang Berkualitas Dalam Rangka Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penguatan Perekonomian melalui Pengembangan Dunia Usaha, Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya.
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air
5. Pengembangan Kualitas Birokrasi dan Kondusivitas Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-3 yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah”.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Inspektorat Daerah Kabupaten Paser telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Paser

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Kab. Paser	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,75 (Nilai)	31.624.951.060	Kab. Paser	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,75 (Nilai)	31.624.951.060	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Kab. Paser	Tingkat Maturitas SPIP	level 3 (3.000)		Kab. Paser	Tingkat Maturitas SPIP	level 3 (3.000)		
	Kab. Paser	Tingkat Kapabilitas APIP	level 3 (3.000)		Kab. Paser	Tingkat Kapabilitas APIP	level 3 (3.000)		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Paser	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,9 (Nilai)	4.245.972.323	Kab. Paser	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,9 (Nilai)	4.245.972.323	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.329.123.323	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	3.329.123.323	
	Kab. Paser	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%		Kab. Paser	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%		
	Kab. Paser	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%		Kab. Paser	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%		
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	135 Laporan	513.986.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96 Laporan	513.986.000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	140 Laporan	910.417.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	126 Laporan	910.417.000	
Reviu Laporan Kinerja	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	251.685.500	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	251.685.500	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Reviu Laporan Keuangan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	417.757.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	19 Laporan	417.757.000	
Pengawasan Desa	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	461.565.500	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	67 Laporan	461.565.500	
Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Paser	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	139.008.000	Kab. Paser	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	139.008.000	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	634.704.323	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Laporan	634.704.323	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100%	916.849.000	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100%	916.849.000	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	916.849.000	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	916.849.000	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	85%	2.587.421.586	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	85%	2.587.421.586	
	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	85%		Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	85%		

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendampingan dan Asistensi	Kab. Paser	Persentase Pelaksanaan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	2.587.421.586	Kab. Paser	Persentase Pelaksanaan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	2.587.421.586	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	261.026.000	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	261.026.000	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	600.414.000	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	600.414.000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.488.289.586	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	1.488.289.586	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	237.692.000	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	237.692.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tana Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	24.791.557.151	Tana Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	24.791.557.151	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi	100%	396.966.000	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi	100%	396.966.000	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kinerja Perangkat Daerah				Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	130.740.000	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	130.740.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	140.706.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	140.706.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	125.520.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	125.520.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16.946.877.679	Tana Paser	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	16.946.877.679	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	16.582.934.479	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	16.582.934.479	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	309.073.200	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	309.073.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	54.870.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	54.870.000	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	35.568.000	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	35.568.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.300.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.300.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	29.268.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	29.268.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	4.197.820.500	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	4.197.820.500	
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	669.395.500	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	669.395.500	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	282.066.000	Tana Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	282.066.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tana Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	3.246.359.000	Tana Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	3.246.359.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.323.603.537	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.323.603.537	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	1 Paket	1.266.227.232	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	8 Paket	1.266.227.232	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	328.291.535	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	328.291.535	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.691.750	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	59.691.750	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	5.100.000	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.100.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	81.408.020	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	81.408.020	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	582.885.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	582.885.000	

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Paser	Persentaase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	377.090.843	Tana Paser	Persentaase Terpenuhiya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	377.090.843	
Pengadaan Mebel	Tana Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	175.133.843	Tana Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	175.133.843	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	201.957.000	Tana Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	201.957.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	321.272.000	Tana Paser	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	321.272.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	321.272.000	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	321.272.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	192.358.592	Tana Paser	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	192.358.592	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	174.508.592	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	174.508.592	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tana Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	17.850.000	Tana Paser	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	17.850.000	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Paser pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	Kab. Paser	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	71,75 (Nilai)	29.665.248.262
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan	Kab. Paser	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	level 3	
	Kab. Paser	Tingkat Kapabilitas APIP	level 3	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Paser	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	3,9 (Nilai)	6.210.181.300
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Disusun Tepat Waktu	100%	5.177.851.300
	Kab. Paser	Persentase Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti	92%	
	Kab. Paser	Persentase Temuan Internal yang Ditindaklanjuti	58%	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	135 Laporan	949.372.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	140 Laporan	992.282.000
Reviu Laporan Kinerja	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3 Laporan	410.060.000
Reviu Laporan Keuangan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan	676.894.000
Pengawasan Desa	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	729.335.300
Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Paser	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	355.107.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan	4 Laporan	1.064.801.000

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Disusun Tepat Waktu	100%	1.032.330.000
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	1.032.330.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	85%	1.655.184.700
	Kab. Paser	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	85%	
Pendampingan dan Asistensi	Kab. Paser	Persentase Pelaksanaan Hasil Pendampingan dan Asistensi	100%	1.655.184.700
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	110.424.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42 Perangkat Daerah	437.528.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Paser	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.008.502.700
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Paser	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	98.730.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tana Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80%	21.799.882.262
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	236.857.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	63.036.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	39.024.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tana Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	134.797.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.847.875.162

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tana Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	14.639.736.062
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tana Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200 Dokumen	153.269.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	54.870.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	35.268.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	29.268.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	2.822.103.400
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Tana Paser	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	101.357.400
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tana Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	68.896.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tana Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	2.651.850.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.953.995.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	8 Paket	1.017.311.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tana Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	284.305.300
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	81.929.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tana Paser	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.058.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tana Paser	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.493.800

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan			
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	517.897.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.411.175.900
Pengadaan Mebel	Tana Paser	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	150.745.100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tana Paser	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1.260.430.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	293.297.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	293.297.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tana Paser	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	199.308.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tana Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	199.308.800

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

5.1 Catatan Penting

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat.

Dalam hal ini ketersediaan anggaran pada Inspektorat Daerah kabupaten Paser belum mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga

kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Paser mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.3 Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tana Paser, 22 Agustus 2025

INSPEKTUR DAERAH,



HI. DHARNI HARYATI, SE. M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19720126 199703 2 002